

## Kritik Retorika Sofis dan Politik: Upaya Memprioritaskan Kebenaran Dalam Hidup Berpolitik

Bernardus Badj \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores-NTT  
Email: [bernardbadj@gmail.com](mailto:bernardbadj@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkritisi retorika sofis dan politik dalam praktiknya di Indonesia. Konsep retorika sofis (Protogoras dan Gorgias) mengajarkan kepada para muridnya akan pentingnya kepandaian berbicara seretak memasung kebenaran. Pemasungan ini bertolak dari pandangan mereka yang tidak menganggap nilai kebenaran. Mereka mendegradasi kebenaran dan hanya mementingkan kepandaian berbicara. Retorika semacam ini masih dan sedang dipraktikkan di Indonesia oleh para politisi. Politik Indonesia kian kisruh oleh perlbagai aksi yang apolitis seperti menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga dan kelompok semata, korupsi berjemaah, keengganan berbicara, mentalitas budak yang kian digandrungi oleh para politisi. Aksi-aksi seperti ini menggambarkan retorika melahirkan politik busuk, retorika mengekalkan kekuasaan, dan retorika melumpuhkan daya kritis masyarakat. Tulisan ini akan menggunakan metode kepustakaan sepenuhnya dan berotasi pada poros pemikiran kaum sofis (Protogoras dan Gorgias) khususnya pada ajaran retorika. Kontribusi dari tulisan ini diharapkan dapat mendukung dan memberi wawasan kepada para politisi Indonesia untuk tidak melestarikan dan mempraktikkan retorika sofis yang hanya pandai merangkai kata dan bersilat lidah tetapi harus mengabdikan kepada kebenaran agar terciptanya kesejahteraan sosial bagi bangsa dan negara di segala dimensi kehidupan.

**Kata Kunci:** Sofis, Retorika, Politisi, dan Kebenaran.

### Abstract

*This paper aims to criticize the rhetoric of the sophists and politics in practice in Indonesia. The concept of sophist rhetoric (Protogoras and Gorgias) teaches its students the importance of eloquence while simultaneously shackling the truth. This shackling is based on their view that does not consider the value of truth. They degrade the truth and only care about eloquence. This kind of rhetoric is still and is being practiced in Indonesia by politicians. Indonesian politics is increasingly chaotic by various apolitical actions such as abusing power for the benefit of family and groups alone, collective corruption, reluctance to speak, and a slave mentality that is increasingly popular with politicians. Actions like this illustrate that rhetoric gives birth to rotten politics, rhetoric perpetuates power, and rhetoric paralyzes the critical power of society. This paper will use the full library method and rotate on the axis of thought of the sophists (Protogoras and Gorgias) especially on the teachings of rhetoric. The contribution of this article is expected to support and provide insight to Indonesian politicians not to preserve and practice sophist rhetoric that is only good at stringing together words and playing with words but must serve the truth in order to create social welfare for the nation and state in all dimensions of life.*

**Keywords:** *Sophist, Rhetoric, Politician, and Truth.*

### PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya disematkan dengan predikat *animal loquens* atau *talking animal* (makhluk yang berbicara) sebagai atribut yang menyiratkan makna bahwa manusia adalah makhluk berbahasa atau hewan bertutur (Fransiskus Bustan dan Yohanes Bhae, 2020: 30). Keunggulan manusia sangat nyata dalam hal bahasa. Bahasa dipahami dan dimaknai sebagai sarana atau media komunikasi paling efektif yang dipakai manusia untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan pengalamannya di dunia. Dengan demikian, bahasa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dengan manusia lain untuk saling berinteraksi. Dewasa ini, bahasa merupakan

unsur utama retorika seringkali didistorsi dan diinstrumentalisasi untuk kepentingan primordial. Retorika dipakai sebagai sarana represi, dan *locus* kekuasaan. Hal ini tentu mereduksi peranan bahasa sebagai sarana komunikasi yang mempersatukan setiap orang baik secara politis maupun sosial di ruang publik. Bahasa justru menjadi sarana perpecahan dalam kehidupan bersama. Dalam konteks bahasa, retorika menjadi faktor penting dalam upaya untuk mencapai kaidah-kaidah kebenaran dalam kehidupan berpolitik.

Tradisi retorika dipelopori oleh beberapa filsuf muda yang menamakan diri mereka sebagai yakni Protogoras, Gorgias, dan Isokrates, di daerah Yunani tepatnya di Athena pada abad ke-6 dan abad ke-5 SM. Kaum sofis mengajarkan ketrampilan berbahasa (terutama berpidato) di depan publik dengan maksud untuk memenangkan tujuan politik tertentu melalui tutur (lisan) (Sulistyarini dan Anna Gustina, 2020: 4). Retorika sofis mementingkan pencapaian tujuan tanpa mengutamakan kebenaran sehingga tereduksi dalam cara-cara debat politik, iklan, propaganda, pernyataan politik, maupun kampanye partai.

Plato mengecam retorika sofis sebagai suatu upaya untuk memanipulasi opini publik dan mengabaikan kaidah-kaidah pencapaian kebenaran. Retorika sofis tidak menjadikan kebenaran sebagai sarana untuk membentuk opini publik melainkan mereduskinya sebagai sekedar kecakapan bahasa untuk memenangkan tujuan politik. Selain Plato, Aristoteles juga menganggap bahwa retorika sofis tidak membangun suatu peradaban manusia yang beradab karena mengabaikan nilai-nilai kebenaran (Daniel Deha, 2021: 6-7).

Kritikan dari Plato dan Aristoteles kepada kaum sofis sangat relevan bagi para politisi Indonesia. Misalnya, pada tahun-tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, mahasiswa dan politisi karena dituduh melakukan intervensi terhadap konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaan sebagai Presiden demi mendukung langkah politik putra sulungnya, Gibran dalam pemilu 2024. Selain itu, para politisi merekayasa politik, mengekalkan kekuasaan, dan melahirkan politik busuk dalam percaturan politik untuk mendapatkan kekuasaan secara ilegal, mendulang rizki dengan korupsi menjengkal, membantai lawan politik secara bidaab, membentuk opini publik dengan mekar-mekar jahat dan lain sebagainya.

Bertolak dari alur pemikiran di atas, maka tulisan ini ingin mengkritisi retorika sofis dalam praktiknya di Indonesia, dan memberikan redefinisi retorika yang benar: upaya mencari kebenaran dalam hidup berpolitik.

## **METODE PENULISAN**

Dalam proses penyelesaian tulisan ilmiah ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*). Menurut Abdul Rrahman Soleh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah (Abdul Rrahman Soleh, 2011: 31) Jadi, dalam metode ini data-data diperoleh melalui kajian kepustakaan. Proses yang dilakukan meliputi pencarian literatur, buku, dan manuskrip di perpustakaan yang relevan dengan karya ilmiah ini. Sumber-sumber kepustakaan tersebut juga dilengkapi dengan artikel-artikel ilmiah, surat kabar, dan sumber dari internet yang memiliki hubungan erat dengan judul yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Protogoras**

Fokus utama pada bagian ini adalah ajaran Protogoras mengenai retorika dan relativisme. Retorika yang diajarkan oleh Protogoras memiliki keterkaitan erat dengan ajaran relativisme. Relativisme sebagai paham yang mengajarkan bahwa kebenaran yang ada, dan yang diketahui oleh manusia adalah kebenaran yang bersifat relatif dan bergantung pada kemampuan retorik.

Kebenaran yang dipahami Protogoras sebagai sesuatu yang bersifat relatif membuka jalan bagi pengajaran ilmu retorika (Dario Composta, 1980: 100). Artinya untuk meyakinkan orang lain akan sebuah pendapat yang dianggap benar, seseorang harus membutuhkan retorika sebagai sebuah seni meyakinkan.

Retorika Protogoras memiliki hubungan erat dengan relativisme. Jadi, sesuatu yang ralatif harus dibutuhkan 'kemampuan' untuk meyakinkan apa yang dianggap benar. Setiap orang ingin meyakinkan pendapatnya kepada orang lain mesti pandai menyusun dan mempertahankan dalil yang dibangunnya. Dalam hal ini doktrin relativisme Protogoras berhubungan erat dengan eristik dan dialetika. Doktrin relativisme dalam terang dialetika dan eristik bila digunakan secara sungguh-sungguh dapat membantu orang dalam meraih sebuah kekuasaan. Praktik dialetika dan eristik dalam meyakinkan sebuah relativisme tidak selalu mengindahkan kebenaran dan keadilan (Frederic Copleston, 1991: 90).

Ajaran Protogoras mengenai relativisme dalam kaitannya dengan retorika ini secara jelas berdampak dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik bukan tidak mungkin setiap calon pemimpin memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Setiap kandidat pemimpin akan mengklaim bahwa visi dan misinya adalah yang paling benar. Pada titik ini terjadi perbenturan dan pertikain visi dan misi. Pada titik ini pula retorika dibutuhkan di tengah 'lautan' relativisme. Setiap kandidat akan menggunakan kemampuan retorika untuk meyakinkan masyarakat bahwa visi dan misinya yang paling baik dan dapat membawa perubahan. Rekayasa politik ini terungkap dalam bahasa manipulatif untuk menggaet simpati massa dan menjatuhkan atau menyingkirkan lawan politik dalam merebut tampuk politik.

Ajaran relativisme Protogoras sejak dahulu telah menerobos pori-pori perpolitikan di Athena. Hal ini dapat berbahaya apabila diterjemahkan dalam prinsip-prinsip retorika. Jika diaplikasikan dalam hukum maka bukan keadilan melainkan argumen terbaikkah yang penting dalam hukum. Hal yang penting dalam kehidupan politik adalah bukan yang benar atau salah tetapi apa yang meyakinkan (Konrad Kebung: 2005: 56). Artinya retorika dalam keterbukaan relativisme merupakan senjata ampuh dalam manipulasi instrumentalisasi, dan rasionalisasi politik. Prinsip retorika, membuat argumen yang paling lemah menjadi yang paling kuat dan menciptakan kebenaran semu.

### **Gorgias**

Fokus utama pada bagian ini adalah ajaran Gorgias mengenai retorika dan nihilisme. Ajaran Gorgias mengenai nihilisme dapat dilihat sebagai bukti kecakapan bersilat lidah yang dimilikinya. Hal ini dapat ditemukan dalam pernyataan mengenai ada. Gorgias mendengungkan *not nothing exists, that if anything exists it is incomprehensible, and that even if it is incomprehensible, it cannot be communicated* (Stumpf dan James Fieser, 2003: 34). Dari pernyataan Gorgias ini, penulis akan menjabarkannya sebagai berikut: Pertama, *not nothing exists* (tidak ada sesuatu pun yang ada). Mengenai pernyataan ini, A. Sudiarja menerangkan bahwa;

Sebab jika ada sesuatu, yang ada itu kekal atau dilahirkan. Nah, keduanya tidak mungkin. Jadi tidak ada apa-apa sama sekali. Sebab apa yang dilahirkan tidak mungkin? Sebab lahir berarti lahir dari yang ada atau dari yang tidak ada. Nah, dari yang tidak ada tak dapat dilahirkan apa-apa. Akan tetapi juga tidak mungkin dilahirkan dari yang ada. Sebab yang sudah ada itu sudah ada, dan jika sudah ada tidak dapat dilahirkan. Jadi jika ada sesuatu, hal itu dapat dilahirkan. Jadi tentunya kekal. Akan tetapi, ini pun tidak mungkin, mengapa apa? Sebab jika kekal, tak ada batasnya. Akan tetapi jika tidak ada batasnya, tidak berada di suatu tempat karena ada di suatu tempat sama dengan dibatasi oleh tempat. Jika demikian, yang ada di mana pun juga. Jika tidak ada di mana pun juga, ini berarti tidak ada sama sekali.

Jelaslah bahwa tidak ada apa-apa sama sekali (A. sudiarta, at. al., 2006: 1124).

Sebab kalau ada sesuatu, mestilah ia terjadi dan ada pula selama-lamanya. Terjadi itu tidak bisa timbul dari yang ada atau dari yang tidak ada. Ada selama-lamanya mustahil pula sebab ada tidak berhingga. Yang tidak berhingga itu tidak ada di mana-mana, sebab ia tidak dapat ada di dalam dirinya sendiri atau di dalam yang lain (Mohamad Hatta, 1986: 70).

Kedua, *that is anything exists it is incomprehensible* (juga apabila ada sesuatu kita tidak dapat memahaminya). Kita tidak dapat memahaminya karena yang ada hanyalah pikiran itu sendiri. Pikiran itu sendiri yang membentuk pengetahuan tentang yang ada. Sedangkan realitas sebenarnya tidak ada. Hal yang tidak ada sama sekali tidak dapat masuk dalam pikiran, sebab mustahil pikiran dapat mencerna apa yang sebenarnya tidak ada. Pikiran hanya 'berkutut' dengan apa yang ada. Pikiran tidak mampu memahami hal yang tidak ada di luar diri. Kita tidak dapat memahami sesuatu karena kemampuan indera kita terbatas. Jadi manusia tidak dapat memahami sesuatu (Mohamad Hatta, 1986).

Ketiga, *that even if it is incomprehensible, it cannot be communicated* (juga apabila kita dapat memahami sesuatu, kita tidak dapat membahasakannya). Kita tidak dapat mengkomunikasikan kepada orang lain agar mereka memahaminya. Pengetahuan yang dimiliki tidak bisa dialihkan kepada orang lain dalam arti yang sebenarnya. Apa yang dikatakan selalu berbeda dengan pengetahuan itu sendiri. Orang tidak bisa memindahkan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain secara penuh. Hal ini disebabkan oleh kemampuan manusia, baik yang memberi maupun yang menerima itu terbatas. Melalui kalimat ini Gorgias ingin mengatakan bahwa setiap orang mempunyai pengetahuannya sendiri yang tidak bisa dimengerti secara penuh oleh orang lain (Mohamad Hatta, 1986).

Pernyataan Gorgias di atas, sebenarnya menunjukkan nihilisme atau skeptisisme yang radikal. Tidak ada sesuatu yang bersifat baku, yang ada di dalam dirinya sendiri, yang merupakan rujukan bahasa dalam menilai kebenarannya. Sebab itu, semua yang dapat dipikirkan dan dibicarakan hanya merupakan pendapat, sehingga yang terpenting adalah berdebat. Dengan berdebat kita menciptakan kenyataan. Kenyataan yang ada kita ciptakan melalui pembicaraan kita. Melalui pembicaraan, kita mencapai kesepakatan tentang apa yang ada (Paul Budi Kleden, 2006: 77). Dalam pertentangan pendapat ini dibutuhkan kemampuan retorika.

Dalil-dalil nihilisme ini dikuatkan dengan retorika. Nihilisme dalam terang retorika mengajarkan orang untuk meniadakan segala-galanya. Gorgias mengerti benar akan psikologi orang Yunani di masa itu, yang suka bersoal dengan memakai dalil dan lawan dalil, tesis dan antitesis. Watak itu 'diasah' dengan memajukan pelbagai paradoks, keterangan yang mengandung pertentangan di dalamnya. Setiap pendapat lawan ditunjukkan sebagai paradoks, sebab itu dikatakan tidak benar (Mohamad Hatta, 1986). Gorgias dengan keterampilan retorika yang dimilikinya berusaha mengajarkan kepada para muridnya untuk bisa memenangkan sebuah perdebatan. Dia secara tidak langsung mengajak para muridnya untuk mengalahkan para musuh politiknya.

Ajaran kedua sofis ini dapat disimpulkan bahwa, mereka hanya mengajarkan orang untuk mencapai kekuasaan politis dan tidak memperjuangkan kebenaran serta kesejahteraan umum setelah seseorang sampai pada tampuk politik atau puncak kekuasaan. Hal dikritik oleh Aristoteles bahwa:

retorika bukan suatu media yang digunakan untuk meraih kekuasaan dan kemenangan dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi retorika harus mengandung kebenaran dan yang dapat diujikan sehingga tidak dapat menyesatkan para pendengarnya. Lanjut Aristoteles retorika berfungsi untuk membimbing orang dalam mengambil keputusan yang benar, membimbing orang untuk memahami masalah secara baik sehingga dapat

menyesuaikan diri dengan kondisi pendengarnya, membimbing orang menemukan ulasan yang baik, dan membimbing orang dalam mempertahankan argumennya (Daniel Deha, 2021).

Ajaran kedua kaum sofis ini, sadar atau tidak sadar para politisi Indonesia sedang mempraktikannya. Mereka benar-benar menjadi para murid dari kaum sofis. Mereka tidak mengajarkan nilai kebenaran dari setiap pembicaraannya tetapi bagaimana perkataan mereka dapat 'membujuk' publik dan hanya memperhitungkan bagaimana cara untuk mencapai suatu jabatan politis atau tambuk politik.

Bertolak dari alur pemikiran ini, penulis akan menguraikan secara singkat beberapa kritikan relevansi atas retorika sofis dalam praktiknya di Indonesia.

### **Relevansi dan Kritik atas Retorika Sofis Dalam Praktiknya di Indonesia** **Retorika Sofis Melahirkan Politik Busuk**

Retorika yang diajarkan oleh kaum sofis dalam praktiknya di Indonesia telah melahirkan politik busuk. Banyak politisi menggunakan kepandaian berbicara untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok semata. Wilayah politik diproduksi untuk memperkaya diri. Suasana politik seperti ini makin kisruh hanya menyisakan kisah kelam bagi masyarakat. Akuntabilitas, transparansi, dan orientasi konsensus yang membutuhkan pertanggungjawaban publik tidak jarang dimanipulasi oleh aksi buruk para politisi.

Max Regus dalam bukunya *Tobat Politik* mengatakan bahwa elitisme kekuasaan merupakan kristalisasi dari penyatuan pengusaha dan penguasa dalam politik (Max Regus, 2009: 9). Perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa juga merangsek hingga para politisi. Betapa tidak, senjata utama menuju ruang 'perwakilan' adalah uang. Tidak heran jika opini publik yang terbentuk adalah 'siapa pun yang bisa mewakili rakyat asalkan ada uang'. Ungkapan seperti ini menggambarkan dominasi *money politic* dalam sepak terjang politik dewasa ini. Latar politik demikian hanya akan berujung pada paradoks kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai sebuah pengabdian tetapi lahan basah untuk mendapatkan sumber harta.

Janji-janji manis saat kampanye sama sekali tidak menampilkan perubahan karena dimistifikasi oleh pesona uang yang hadir dalam karya 'karitatif kekuasaan' seperti bantuan musiman, proyek jalan yang asal-asalan dan pembangunan lainnya (Venansius Haryanto, 2012: 79-80). *Money politic* akhirnya membidani politik yang gagap retorika politik yang berbasis kebenaran. Yang ada hanyalah retorika politik penguasa yang berusaha membungkus segala karya busuk politik. Situasi seperti ini akibat dari retorika para politisi yang meniadakan nilai kebenaran dan akhirnya berimplikasi pada cara mereka menyelenggarakan kekuasaan.

### **Retorika Sofis merekayasa politik**

Logika politik dan kapitalis cenderung mengubah sistem komunikasi menjadi sistem yang penuh rekayasa. Rekayasa ini menyusup dalam celah-celah di antara gagasan dan opini. Retorika yang bertujuan merekayasa berpretensi untuk mempublikasikan ideologi tertentu tanpa diakui orang bahwa ada manipulasi di dalamnya. Rekayasa oleh retorika mengandaikan adanya kebohongan yang diorganisir dan terselubung. Rekayasa ini nyata dalam *marketing* politik. *Marketing* politik tentu diarahkan ke hal yang menarik bagi konsumen. Maka komunikator yang berhubungan dengan massa *audience* mesti beradaptasi dengan jurnalisme populis. Berkembanglah komentar warga biasa, dialog interaktif lewat telepon, konfrontasi dengan wakil partai, dan lain-lain (Haryoatmoko, 2007: 70-73). Di sini retorika dijadikan sarana yang mengungkapkan manipulasi itu sekaligus menyelubungi atau menyembunyikan kebenaran.

Bila dicermati lebih jauh, ajaran retorika sofis dalam bidang politik telah direkayasa dan terungkap dalam bahasa manipulatif untuk menggaet simpati massa. Dengan rekayasa, wacana politik menunjukkan perannya untuk menggantikan kekuasaan dan kekerasan ganda baik fisik maupun simbolik (Haryoatmoko, 2007). Oleh karena itu, retorika digunakan sebagai sarana kekerasan yang mungkin tidak melukai objek secara fisik, tetapi mengganggu psikologi dan mental.



Retorika semacam ini untuk menjatuhkan atau menyingkirkan lawan politis cenderung dipakai sebagai strategi dalam usaha merubut tampuk politik. Dalam kaitan dengan ini, ungkapan 'kekerasan melalui media sosial' benar jika media massa memasukkan berita atau opini yang berorientasi menyingkirkan pihak tertentu (Peter Tan, 2013: 99-100).

Rekayasa politik itu menjadi strategi kebanyakan politisi. Politisi cenderung bersembunyi di balik kata-kata dan kalimat kabur, klaim-klaim yang memanipulasi kenyataan sebenarnya, dan litotes yang menghindar dari penerapannya. Politikus cenderung bersilat lidah dengan memakai teknik metamorfosis dalam rayuan. Philippe Breton, secara menarik mengungkapkan hal ini dengan perkataan: "marayu berarti mati sebagai realitas untuk menghasilkan tipu daya" (Haryoatmoko, 2007). Apa artinya? Metamorfosis ini lebih banyak mempengaruhi perasaan pendengar sehingga menimbulkan efek ketertarikan atau keyakinan. Dalam metameofisis rayuan ini, retorika tidak lagi dipakai sebagai sarana pengungkapan kebenaran tetapi dipakai sebagai sarana tipu daya. Itu berarti realitas atau kebenaran 'dimatikan' untuk menghasilkan tipu daya.

### **Retorika Sofis Mengekalkan Kekuasaan**

Retorika sofis banyak dipraktikkan dalam dunia politik di negara Indonesia bukan hanya untuk memperebutkan kekuasaan tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan kepandaian retorika seorang politisi dapat terus membujuk rakyat untuk terus mempertahankannya dalam memegang suatu jabatan. Seorang politisi akan mengkonstruksi wacana sedemikian rupa agar dia tetap berada pada tampuk kekuasaan. Kepandaian berbicara yang didukung dengan tindakan memperhatikan kepentingan rakyat akan membantu seorang pemimpin dalam melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Rakyat akan terus memilihnya karena dinilai telah berhasil membawa kesejahteraan. Rakyat akan menobatkannya sebagai pemimpin yang paling baik karena telah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Rakyat melihat dia sebagai yang terbaik dari semua kandidat yang ingin memiliki kekuasaan. Jika semua pemimpin buruk maka dia diyakini memiliki keburukan yang terkecil (*minus malum*). Para pemegang kekuasaan akan melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan pesona bahasa mereka dapat mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki. Bahasa diwacanakan sedemikian rupa agar kekuasaan tetap terpelihara (Dori Wuwur, 2009: 12). Hal yang terpenting adalah peluang tetap terjaga dan kursi kekuasaan bisa aman. Para pemimpin dalam mempertahankan kekuasaan terusewartakan kebohongan.

Tiada hari tanpa kebohongan dan tiada kebohongan tanpa kebenaran. Dalam memproduksi kebohongan itu mereka selalu menghadirkan bukti yang tampaknya benar. Namun, bila dicermati lebih lanjut bukti-bukti itu hanya membantu membungkus kebohongan. Rakyat pada saat-saat tertentu hanya menjadi komoditas politik kelas elite. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat bagi para elite politik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Politik sebagai medan untuk merebut, mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan sangat rentan terhadap pelbagai praktik manipulasi. Para politisi hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan *bonum commune* (Max Regus, 2009), yang penting bagi para politisi adalah mempertahankan kekuasaan.

Para penguasa menggunakan bahasa untuk mengamankan kekuasaan. Oleh karena itu, elite politik melakukan konsolidasi di pelbagai bidang termasuk rekayasa bahasa. Usaha untuk mempertahankan kekuasaan dilakukan dengan penghalusan konsep, memperkasar bahasa untuk menyudutkan kekuatan lain, memproduksi konsep-konsep bahasa yang menarik untuk membius masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahasa dapat membantu seseorang dalam mempertahankan kekuasaannya. Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa:

bahasa menghasilkan kekuasaan (dan juga mempertahankannya, pen.).  
Artinya, di dalam bahasa, kekuasaan menikmati hegemoninya. Melalui  
bahasa kekuasaan menjadi surplus. Singkatnya, karena bahasa, kita

memiliki kuasa. Bahasa adalah sumber ontologis dari kuasa. Setiap kali bahasa diucapkan, setiap kali kekuasaan bekerja (Rocky Gerung, 2011: 60).

Bahasa di sini memiliki hubungan yang erat dengan kuasa. Kuasa dapat mempertahankan dan meluaskan dirinya dalam bahasa. Oleh karena itu, di dalam dunia politik bahasa harus diwasdapai. Apabila tidak diwasdapai maka bahasa hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bahasa jika tidak diawasi akan membawa masyarakat pada jurang penderitaan tidak berujung.

### **Retorika Yang Benar: Upaya Mencari Kebenaran Dalam Hidup Berpolitik** **Redefinisi Arti Retorika**

Retorika dimengerti oleh kaum sofis sebagai sebuah seni yang membuat seseorang berhasil dalam hidup berpolitik. Kaum sofis mereduksi retorika dalam wilayah pengajaran kekuasaan semata-mata. Kekuasaan sebagai tujuan utama ketika orang mempergunakan kemampuan retorika. Orang mempergunakan retorika untuk 'memaksa' orang lain mengakui dan menyetujui opini mereka.

Retorika sebagai ilmu yang mengajarkan tentang seni berbicara, mesti memprioritaskan kebenaran. Retorika dalam ilmu politik bukan sekedar kata-kata kosong tanpa makna tetapi sebuah seni yang sungguh mengungkapkan dan mencari kebenaran. Retorika yang baik tidak cukup hanya bisa berkoar-koar menjanjikan sesuatu kepada masyarakat tanpa aplikasi yang jelas di tengah masyarakat.

Bagi Aristoteles, retorika tidak lain dari pada kemampuan untuk mencetuskan, dalam kejadian tertentu, dan metode persuasi yang ada. Selanjutnya Aristoteles menyebut tiga cara untuk mempengaruhi manusia. *Pertama*, Anda harus sanggup menunjukkan kepada khayalak bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya dan status yang terhormat (*ethos*). *Kedua*, Anda harus menyentuh hati khayalak, perasaan, emosi, harapan, kebencian (*pathos*). Kelak, para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emosional (*emotional appeals*). *Ketiga*, Anda meyakinkan khayalak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini Anda mendekati khayalak lewat otaknya (*logos*) (Rajiyem, 2005: 145-146).

Retorika yang baik adalah sebuah retorika yangewartakan kebenaran dan mengutamakan keadilan dalam masyarakat. Kemampuan merangkai kata semestinya mengantar seseorang untuk memperjuangkan kebenaran bukan untuk membungkus kebenaran secara efektif. Retorika yang dimengerti sebagai seni berkata-kata memperoleh arti yang sebenarnya bila memperjuangkan nilai kebenaran. Komitmen terhadap nilai kebenaran merupakan nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang mesti diusahakan lewat kepandain berbicara (Muhammad Mufid, 2009: 73).

### **Retorika Berdasarkan Hati Naluri**

Hati nurani merupakan guru moral dan lembaga tertinggi dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tutur kata harus terpancar dari hati nurani. Hati nurani berperan sebagai kategori imperatif. Hati nurani sebagai sebuah keniscayaan dalam bertutur. Ia memberikan pendasaran pada apa yang baik, berguna dan apa yang buruk dan tidak berguna. Hati nurani menuntun setiap orang untuk berkata yang benar dan menghindari pembualan (Isidorus Lilijawa, 2007: 199).

Hati nurani memiliki nilai urgensi dalam penggunaan kemampuan beretorika. Retorika dalam dunia politik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik berimplikasi pada kepentingan banyak orang harus berlandaskan hati nurani. Retorika harus berlandaskan pada hati nurani untuk menepis pembohongan dan menghalau pembualan. Hati nurani boleh dikatakan sebagai *condition sine qua non* dalam beretorika yang ingin mencapai *bonum commune* (Isidorus Lilijawa, 2007). Hati nurani bukanlah hal yang terpisah dari ilmu retorika. Retorika meski berlandaskan hati nurani agar bisa berkata benar dan mendapat simpati

rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Rakyat menaruh simpati bukan karena kemampuan merangkai kata tetapi lebih pada upaya untuk mencari kebenaran lewat kepandaian berkata-kata. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* mengatakan bahwa retorika mempunyai hubungan erat dengan moral, karena harus mengemukakan sesuatu yang benar. Kebenaran menjadi landasan retorika yang sejati (Rajiyem, 2005).

### **Retorika Yang Mengutamakan *Bonum Commune***

Politik dalam perspektif kaum sofis hanyalah medan yang memungkinkan orang untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Di sini orang mengejar tujuan yang semata-mata untuk diri sendiri. Orang hanya berpikir bagaimana dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang bisa memperkaya diri dan mengutamakan kepentingan kelompok. Para politisi setelah mencapai kekuasaan tidak lagi mewujudkan *bonum commune* tetapi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penggunaan retorika hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan pribadi ini.

Tujuan dari sebuah keterlibatan politik adalah untuk mengupayakan *bonum commune*. Para penguasa yang sudah dipercayakan untuk memegang suatu jabatan mesti bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Retorika yang diketengahkan dihadapan publik mesti sebuah retorika yang terarah pada pencapaian *bonum commune*. Pengungkapan kata-kata yang indah dan menggugah mesti terarah pada pencarian kebenaran. Kata-kata tidak cukup bisa menyentuh wilayah perasaan para pendengar tetapi harus mampu memberi perubahan pada terciptanya kesejahteraan bersama.

### **Retorika Tanpa Janji**

Retorika yang benar merupakan retorika yang tidak mengumbar janji lewat permainan kata-kata yang menarik. Retorika yang hanya mengumbar janji pada dasarnya retorika yang memasung nilai kebenaran. Retorika hanya memproduksi janji merupakan retorika berbahaya yang dapat menciptakan kekacauan. Retorika dalam politik mesti menghindari janji. Retorika mesti tampak sebagai penyampaian kata-kata yang menggugah tanpa janji-janji yang bersifat membual. Kepandaian kata-kata yang menggugah harus diejawantah dalam pembuatan nyata. Masyarakat kadang sudah bosan dengan janji-janji. Dengan menebar janji kosong rakyat malahan merasa jengah dan kehilangan kepercayaan pada politisi tertentu (Paulus Mujiran, 2004: 171). Tindakan-tindakan konkret lebih dibutuhkan publik dari pada janji-janji kosong.

Retorika tanpa janji menggarisbawahi pemahaman akan retorika yang baik. Retorika yang tidak ingin mencapai kepentingan diri lewat janji-janji kosong. Kepentingan diri tidak dijadikan sebagai tujuan hingga berimplikasi pada sikap yang menghalalkan segala cara. Janji tidak boleh digunakan untuk melapangkan jalan dalam mencapai kepentingan diri dan menarik simpati rakyat. Retorika bukan sarana untuk menampilkan janji secara menarik. Retorika tidak boleh direduksi pada proses memperdayai publik. Janji sesungguhnya hanya kata-kata yang membohongi masyarakat. Rakyat pada umumnya sudah jenuh menanti janji itu terealisasi. Karena itu, tidak relevan lagi untuk mengumbar janji dengan menggunakan kepandaian retorika (Ingnas U. Kaha, 2004: 56). Janji omong kosong bukan masanya lagi untuk disampaikan kepada khayalak.

### **KESIMPULAN**

Ajaran kaum sofis sangat jelas memanipulasi, instrumentalisasi dan rasionalisasi memacetkan proses komunikasi dalam usaha mencapai kebenaran dan pemahaman timbal balik di antara masyarakat dan para politisi. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya, politik busuk, merekayasa politik dan mengekalkan kekuasaan di negara Indonesia, kita perlu membangun aspek retorika yang berhati nurani, mengutamakan *bonum commune* dan retorika tanpa janji. Melalui retorika kita bersatu memperjuangkan cita-cita bersama dan kebenaran, bersatu pula untuk menghapus segala bentuk ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi bangsa dan negara di segala dimensi kehidupan



Ajaran sofisme juga membawa beberapa aspek posetif dan sangat dirasakan hingga sampai saat ini yakni *Pertama*, kaum sofis sebenarnya sudah membantu menumbuhkan sebuah demokratisasi pendidikan. Mereka memperluas cakupan kaum terdidik dengan kerelaan mereka yang ingin menjadi guru bagi siapa saja. *Kedua*, kaum sofis tidak terikat pada satu *polis*. Mereka merantau ke mana-mana dan hal ini sedikit mencederai paham politis Yunani yang selalu mengikat orang pada *polis*nya sendiri. Tetapi dengan petualang ini mereka sebenarnya meletakkan dasar bagi pemahaman akan pluralitas budaya. *Ketiga*, kaum sofis sebagai orang pertama yang menjadikan pemikiran sebagai objek pemikiran, mereka berpikir tentang berpikir dan bertanya tentang syarat-syarat pemikiran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Syahputra, Akhamad. (2022). "Analisis Filsafat: Reorika Aristoteles Dalam Meningkatkan Kemampuan *Public Speaking* dan Relevansinya Pembelajaran". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 7:1.
- Budi Kleden, Paul. (2006). "Sejarah Filsafat Barat Kuno". (ms). Maumere: IFTK Ledalero.
- Bustan, Fransiskus., dan Bhae, Yohanes. (2020). "Menyingkap Manusia Sebagai Homo Sapiens, Animal Symbolicum, dan Homo Loquens". *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*. 1:1.
- Composta, Dario. (1988). *History of Ancient Philosophy*. Italy: Urbaniana University Press.
- Copleston, Frederic. (1991). *A History of Philosophy*. London: Burns Oates Washbourne LTD.
- Dori Wuwur, Henderikus. (2009). *Rotorika: Terampil Berdiskusi, Berpidato, Berargumentasi, Bernegosiasi*. Cet. Ke-11. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Deha, Daniel. (2021). "Retorika Populisme Dalam Kontestasi Politik di Indonesia: Studi Fenomenologi Pada Generasi Milenial Terhadap Retorika *Post-Truth* Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2019". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 18:1.
- Gerung, Rocky. (2011). "Rahim Laki-laki". *Tempo*.
- Hatta, Mohamad. (1986). *Alam Pikiran Yunani*, Jld II, Cet. Ke-4. Jakarta: Penerbit Tintanas.
- Haryoatmoko. (2007). *Etika Politi*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Ingnas U. Kaha. (2004) "Mempertimbang Politik Janji Pemilu: Upaya Pemulihan Kepercayaan Massa". *Vox*. 48:1.
- Kebung, Konrad. (2005). "Sejarah Filsafat", (ms). Maumere: IFTK Ledalero.
- Lilijawa, Isidorus. (2007). *Mengapa Takut Berpolitik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Mujiran, Paulus. (2004). *Republik Para Maling*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Mufid, Muhammad. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Regus, Max. (2009). *Tobat Politik*. Jakarta: Penerbit Parrhesia Institute.
- Stumpf S.E., dan Fieser, James. (2003). *Socrates to Sartre and Beyond*. New York: McGraw-Hill.
- sudiarja, A., at. al. (2006). *Karya Lengkap Dryarkara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rajiyem. (2005). "Sejarah dan Perkemabangan Retorika". *Jurnal Humaniora*. 17:2.
- Rrahman Soleh, A. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Venansius Haryanto. (2013). "Bahasa, Wakil Rakyat dan Politik: Mereposisi Peranan Bahasa dalam Percaturan Politik Sebagai Wakil Rakyat di Indonesia". *Akademika*. 7:2.
- Tan, Peter. (2013). "Bahasa Indonesia: Dari Gagasan Persatuan Sumpah Pemuda Sampai Problem Masa Kini". *Akademika*. 7:2.

Sulistyarini, Dhanik., dan Gustina Zainal, Anna. (2020). *Bahan Ajar Retorika*. Serang Banteng: Penerbit CV. AA. RIZKY.